



STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

Maryati^{a,*}, Muhammad Isya^b, Azmeri Azmeri^c

^aMagister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

^{b,c}Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

*Corresponding author, email address: maryatisme@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received 12 January 2018

Received in revised form 14 March 2018

Accepted 22 March 2018

Keywords:

Participation, society, construction planning, Lhoknga sub-district of Aceh Besar

ABSTRACT

Aceh was hit by Tsunami in 2004 and was beginning to rebuild and rise from adversity especially in terms of building construction. But there are many constructed houses during the reconstruction project that does not suit the societal need and uninhabitable. The purpose of this study is to analyze and describe the implemented construction planning process whether it was considering the societal expectations and participation. This study also investigates the societal representation whether it was represented by all society groups and identifies how to optimize the construction planning process. This research uses semi-qualitative and quantitative methods. This study was conducted in Lhoknga sub-district of Aceh Besar Regency, involving 4 (four) villages and 95 respondents. The data was collected using questionnaires and interviews. The used research instruments are questionnaires and interview sheets that have been tested in terms of validity and reliability. The results show the construction planning process in Lhoknga sub-district of Aceh Besar Regency. This study suggested that the planning process in the sub-district level was not carried properly. Society participation in construction planning was low (58.95%).

©2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi di Era Otonomi Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan salah satu diantaranya adalah perencanaan. Secara ideal pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai hal dan keterbatasannya.

Agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, pelestarian dan tahap evaluasi. Melalui

pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Merujuk pada tujuan dari perencanaan pembangunan, provinsi Aceh merupakan daerah yang sedang berkembang pesat dari segi pembangunan, berbagai bantuan dari dalam dan luar negeri berdatangan ke Aceh. Khususnya wilayah yang dilanda musibah Tsunami pada tahun 2004. Pada tahun 2014, provinsi Aceh mulai melakukan pembangunan kembali, dan bangkit dari keterpurukan terutama dari segi pembangunan. Khususnya daerah yang dilanda musibah Tsunami.

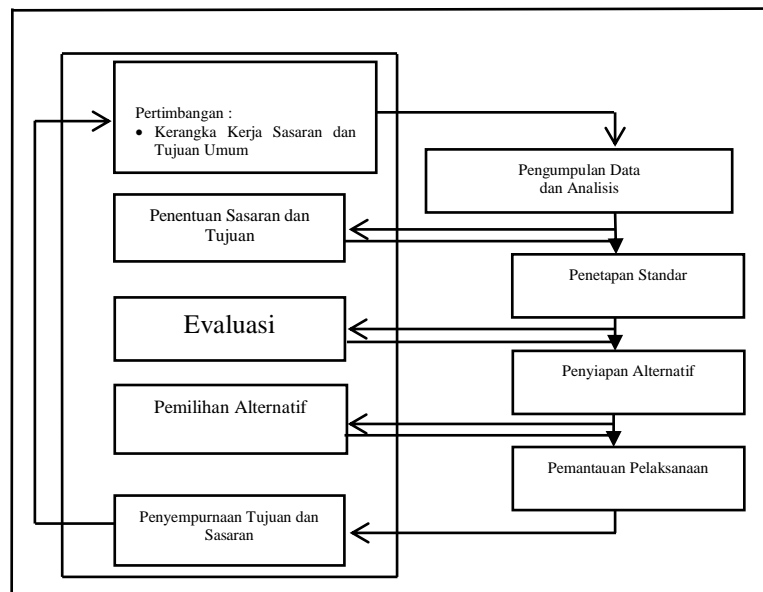
Berdasarkan amatan peneliti, bahwa banyak terdapat bangunan bantuan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara bangunan yang sudah ada masih kurang. Hal ini terkesan bahwa banyak bangunan yang tidak layak pakai/huni, bahkan juga terdapat bangunan yang tidak digunakan samasekali. Pembangunan di Aceh terus berlanjut dan berkembang pesat hingga kini, banyak bangunan yang tidak layak huni dilakukan renovasi ulang oleh pemiliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Lhoknga merupakan daerah yang termasuk kategori berat dilanda musibah Tsunami. Dilihat dari kriteria tersebut, studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sangat sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian ini.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian mendalam, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan (Soemarmo, 2005). Perencanaan partisipatif dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat, seperti yang terlihat pada Gambar 1



Gambar 1. Perencanaan aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat
Sumber : Soemarmo (2005)

Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri (Wijaya, 2001). Ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
2. Partisipatoris, setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis, mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak, dan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas, menjamin keterlibatan semua pihak, selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
5. Legalitas, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, dan tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisibilitas, perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

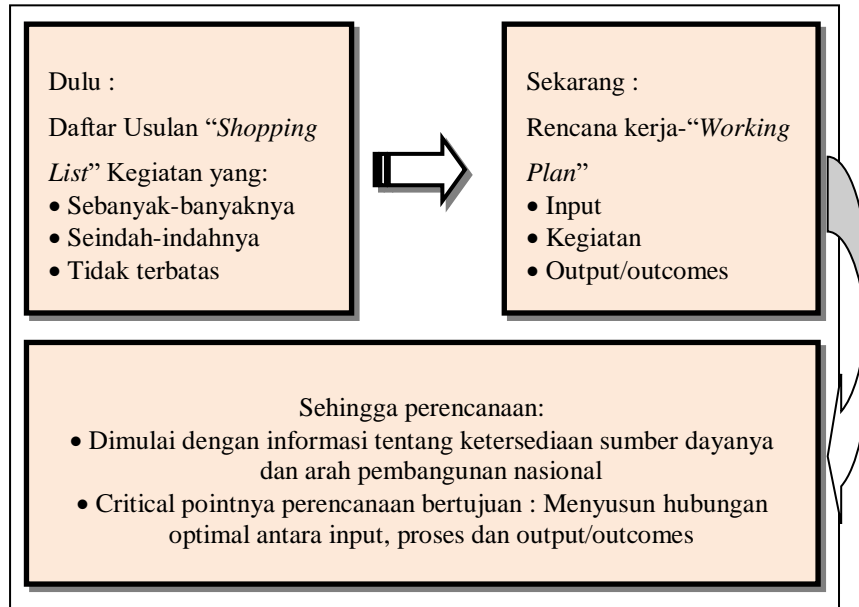
Faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Sunarti (2003).

Musrenbang di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Terdapat lima tahap yang dilalui dan telah disesuaikan dengan perencanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimulai dari:

1. Musyawarah pembangunan desa (musbangdes),
2. Diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan,
3. Rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tingkat Kabupaten/Kota,
4. Rakorbang di tingkat Propinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan
5. Konsultasi nasional pembangunan (konasbang).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perencanaan pembangunan
 Sumber : BPPN (2004)

Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat Lhoknga, yang kemudian ditentukan sampel. Menurut Noor (2012) bahwa penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{\sum X_t}{\sum X_t x \alpha^{2+1}} \quad (1)$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

$\sum X_t$ = Jumlah populasi.

α = tingkat kesalahan yang dipakai 10% atau 0,1.

Metode yang digunakan untuk pengukuran menggunakan skala *likert* yang memiliki 5 (lima) jawaban yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
 Kualifikasi dan Skor Skala *Likert*

No	Kualifikasi	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010)

Uji reliabilitas instrumen dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$r_{11} = 2 \left(1 - \frac{s_1^2 + s_2^2}{s_t^2} \right) \quad (2)$$

Keterangan:

- r_{11} = Reliabilitas instrumen
- s_1^2 = Varians skor butir belahan pertama
- s_2^2 = Varians skor butir belahan kedua
- s_t^2 = Varians skor total (Yusrizal, 2016)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah jika pengukuran dilakukan dalam kondisi yang mirip, hasilnya akan sama. Interpretasi derajat reliabilitas suatu tes dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
 Kategori Reliabilitas Tes

Batasan	Kategori
$0,80 < r_{xy} \leq 1,00$	Sangat Tinggi (sangat baik)
$0,60 < r_{xy} \leq 0,80$	Tinggi (baik)
$0,40 < r_{xy} \leq 0,60$	Cukup (sedang)
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Rendah (kurang)
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Sangat Rendah (sangat kurang)

Sumber: Arikunto (2006)

Uji validitas yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson, atau dikenal dengan *Pearson product moment*.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad (3)$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.
- X = Skor item
- Y = Skor total
- N = Jumlah responden

Validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana kevalidan dari suatu alat yang diukur. Setelah uji reliabilitas dan validitas memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembagian kuesioner dapat dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari 28 desa yang terbagi atas empat mukim yaitu: 1) Mukim Lhoknga, 2) Mukim Kueh, 3) Mukim Lamhom, dan 4) Mukim Lampuuk.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu: merumuskan masalah dan tujuan penelitian, mengumpulkan literatur dan merancang instrumen. Pada tahap pelaksanaan, yaitu: membagikan kuesioner kepada responden, melakukan wawancara dan observasi lapangan, pengolahan dan analisis data, menyusun laporan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, membagi kuesioner dan wawancara langsung. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa observasi, kuisisioner dan rekaman wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sampel ditentukan dengan menetapkan tingkat kepercayaan yang dipakai sebesar 90% dan nilai tingkat kesalahan yang dipakai 10%, nilai tingkat kesalahan tergantung pada tingkat kepercayaan yang dikehendaki Desa di Kecamatan Lhoknga maka akan digunakan persamaan 1:

$$n = \frac{\sum X_t}{\sum X_t x \alpha^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.063}{2.063 x (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 95,37 \approx 95$$

Proses pengolahan dan analisis data dengan metode deskriptif dengan pendekatan kombinasi (*mixed methods*), dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif.

Metode yang digunakan untuk pengukuran menggunakan skala likert seperti pada Tabel 1 untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Lhoknga dalam perencanaan pembangunan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dilakukan uji reliabilitas dan validitas sebelum sebelum penelitian berlangsung. Uji tersebut dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Jika nilai reliabilitas yang diperoleh > 0,6 maka kesimpulannya adalah kuesioner yang diisi responden merupakan reliabel.

Untuk menganalisis tingkat reliabilitas kuesioner dapat dilakukan dengan persamaan 2 dan kategori interpretasi derajat reliabilitas pada Tabel 2.

Uji validitas merupakan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu instrumen. Uji validitas yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson, atau dikenal dengan *Pearson product moment*. Untuk menganalisis tingkat validitas kuesioner dapat dilakukan dengan persamaan 3, dan interpretasi untuk besarnya koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Reliabilitas dan Validitas Instrumen

Hasil analisis data dilakukan dengan persamaan Flanagan (2). Berdasarkan analisis data di dapat $r_{11} = 0,94$ dengan kategori reliabel dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuisisioner dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Validitas instrumen kuisisioner dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 3.5
Validitas Instrumen

Validitas	Persentase	Kategori	Persentase
Valid	83,33 %	Tinggi	83,33 %
		Cukup Tinggi	0,00 %
Tidak Valid	16,67%	Agak Rendah	0,00 %
		Rendah	0,00 %
		Sangat Rendah	16,67 %

4.2 Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lhoknga

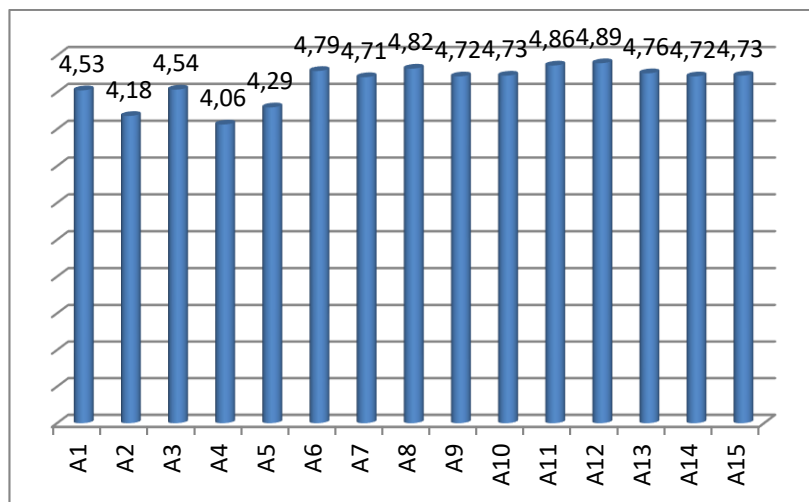
Tata cara penyusunan penetapan dan pelaporan rencana kerja Kecamatan Lhoknga yang menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan berikut ini:

1. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui urutan kegiatan,
2. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan tahunan.
3. Perencanaan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Hasil analisis data diperoleh nilai *mean* tertinggi diperoleh pada pernyataan A3, A8 dan A13 dengan *mean* masing-masing (4,00). Pernyataan A3 merupakan respon masyarakat bahwa wakil masyarakat dari desa yang menghadiri musrenbang di kecamatan diundang secara bergiliran atau hanya orang terdekat dari tokoh masyarakat (Kepala Desa). Pernyataan A8 merupakan respon masyarakat bahwa pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Dan pernyataan A13 merupakan respon tentang masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

Sementara nilai *mean* terendah diperoleh pada pernyataan A5 dengan *mean* (3,66). Nilai *mean* untuk tiap-tiap pernyataan tanggapan responden terhadap dimensi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara grafik dapat dilihat pada Gambar 1.

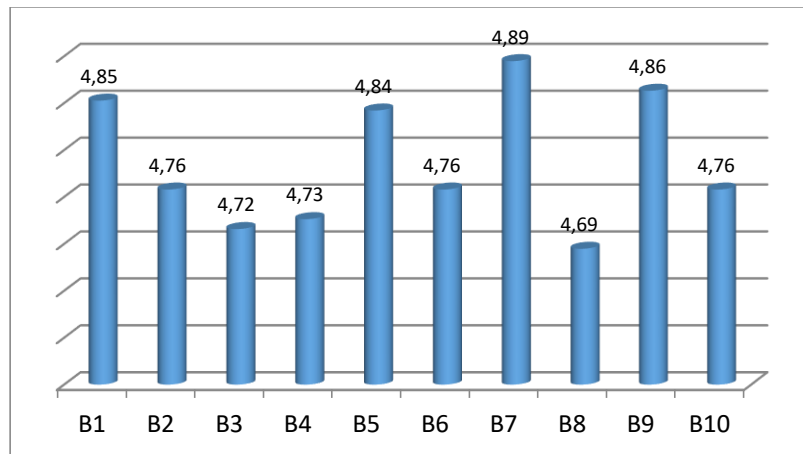


Grafik 1 Nilai *Mean* Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Terdapat dua faktor penyebab tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal, yaitu masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan, namun tidak mau berkorban untuk kepentingan bersama, kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh-tokoh masyarakat (*stakeholders*).

Faktor eksternal, tidak ada kesepakatan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek pembangunan.



Grafik 2 Nilai *Mean* Faktor Penyebab Masyarakat Kurang Berpartisipasi Baik Secara Internal Maupun Eksternal

Faktor internal (B1, B2, B3, B4 dan B5) adalah penyebab masyarakat kurang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan paling tinggi adalah masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dalam bermusyawarah di desa dan di Kecamatan, masyarakat kurang memiliki kapasitas serta keahlian dalam pelaksanaan kegiatan di desa tidak dilibatkan dan melibatkan diri sehingga hasil dari pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Sedangkan faktor eksternal (B6, B7, B7, B8, B9 dan B10) penyebab masyarakat kurang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan paling tinggi adalah kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek pembangunan dan kurang terlibatnya dalam perencanaan pembangunan pada tingkat desa. Masyarakat beranggapan bahwa hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan publik.

Sementara nilai *mean* terendah diperoleh pada pernyataan B4 dengan mean (3,66), yaitu pernyataan tentang kendala internal masyarakat kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh-tokoh masyarakat (*stakeholders*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan di kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa dan kecamatan belum maksimal untuk diajukan ke kabupaten.
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar masih rendah, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Fokus perencanaan, perencanaan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat desa. Hal ini terlihat dari analisis data bahwa masih terdapat responden memilih jawaban tidak setuju sebesar 0,63% dan kurang setuju mencapai 7,90%. Namun yang memilih sangat setuju mencapai 73,68% dan setuju 17,90%.

- b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran. Hal ini terlihat dari analisis data mencapai 58,95% masyarakat sangat setuju.
 - c. Sinergitas, proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara *stakeholders*. Kerjasama yang baik terlihat dari analisis data, sangat setuju mencapai 43,7% dan setuju mencapai 42,45.
 - d. Legalitas, unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum maksimal dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan. Terdapat 7,32% tahapan dalam teknis musrenbang masih pada kategori kurang setuju, dan 78,9% sangat setuju, 13,7% setuju.
3. Terdapat dua faktor penyebab tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yaitu faktor internal dan eksternal.
 - a. Faktor internal, masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan, namun tidak mau berkorban untuk kepentingan bersama, kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh-tokoh masyarakat (*stakeholders*).

Faktor eksternal, tidak ada kesepakatan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek pembangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat lorong supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan.
4. Perlu sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2006, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deviyana, 2013, *Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikelurahan Karang Jati*, Jurnal Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Tjokrowinoto, M., 2002. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wijaya dan Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.